

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

LAPORAN TPID KOTA TEBING TINGGI TRIWULAN I TAHUN 2022

1. PERKEMBANGAN HARGA KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING LAINNYA SERTA RESIKO KE DEPAN

Dari hasil survey beberapa komoditas bahan kebutuhan pokok di tiga pasar yang ada di Kota Tebing Tinggi yang diupload setiap hari di <https://hargapangan.sumutprov.go.id> dari bulan Januari s.d Maret 2022, diperoleh data sebagai berikut : Secara umum harga pangan strategis selama TW I di Kota Tebing Tinggi terpantau relatif stabil. Adapun fluktuasi harga yang terjadi masih dalam batas kewajaran kecuali untuk minyak goreng. Sejak tahun 2021 harga minyak goreng terus menunjukkan kenaikan dipicu oleh tren kenaikan CPO global. Pemerintah sendiri sejak tanggal 1 Februari 2022 telah menetapkan harga HET minyak goreng curah sebesar Rp. 11.500,-/liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp. 13.500,-/liter dan minyak goreng premium Rp. 14.000,-/liter. Dapat dilihat pada tabel sejak dikeluarkannya HET minyak goreng harga minyak goreng di pasar berangsur turun walaupun tidak mengikuti harga HET, namun sejak dicabutnya HET minyak goreng kemasan pada tanggal 16 Maret oleh Pemerintah harga minyak goreng melambung naik hingga mencapai Rp. 24.000/liter. Sampai akhir bulan Maret harga minyak goreng kemasan masih mengikuti harga pasar dan belum turun. Untuk komoditas cabai merah dan bawang merah mengalami kenaikan secara bertahap dari bulan Januari s.d Maret, hal ini akibat kurangnya pasokan akibat curah hujan yang cukup tinggi, baik dari luar daerah maupun dari dalam Kota Tebing Tinggi.

RESIKO KE DEPAN

1. Terdapat potensi kenaikan harga gula pasir terlebih menjelang HBKN Idul Fitri dikarenakan kurangnya pasokan dan tingginya permintaan. Hal ini diakibatkan musim giling baru dimulai pada pertengahan bulan April.
2. Terdapat potensi kenaikan tepung terigu akibat kurangnya pasokan dan tingginya permintaan tepung terigu. Hal ini dikarenakan perang Rusia dan Ukraina sebagai salah satu pemasok terigu terbesar dunia.
3. Kenaikan harga minyak goreng berdampak langsung terhadap kenaikan harga makanan khususnya makanan siap saji yang menggunakan minyak goreng sebagai bahan bakunya. Hal ini akan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat yang otomatis ikut turun.
4. Kenaikan harga LPG 12 kg yang sudah dua kali dikhawatirkan akan menyebabkan migrasi pengguna LPG 12 kg ke LPG 3 kg dan menyebabkan kelangkaan LPG 3 kg.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

Sebagai upaya pengendalian inflasi di daerah, TPID Kota Tebing Tinggi memiliki program kerja berdasarkan roadmap pengendalian inflasi di daerah. Adapun permasalahan yang dihadapi terkait pengendalian harga dan inflasi selama triwulan I 2022 yaitu :

1. Kenaikan harga minyak goreng kemasan yang cukup tinggi dan kurangnya pasokan minyak goreng curah menyebabkan turunnya produksi UMKM dikarenakan naiknya harga jual dan turunnya daya beli masyarakat.
2. Pasokan yang tidak stabil dan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi kepada daerah lain dalam hal pemenuhan kebutuhan komoditas cabai rawit, cabai merah, bawang merah menyebabkan harga komoditas tersebut sering mengalami fluktuasi yang cukup tinggi.
3. Tingginya permintaan dan kurangnya pasokan terhadap produk telur ayam broiler dan daging ayam broiler menyebabkan harga komoditas tersebut tidak stabil, terlebih menjelang HBKN.
4. Ketergantungan yang cukup tinggi terhadap produk ikan laut serta pasokan yang tidak stabil karena dipengaruhi oleh faktor cuaca menyebabkan harga ikan laut tidak stabil.
5. Naiknya harga gas LPG 12 kg dikhawatirkan menyebabkan kelangkaan LPG 3 kg akibat migrasi dari pengguna 12 kg ke 3 kg.
6. Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina mempengaruhi harga tepung terigu di pasar, terlebih menjelang HBKN Idul Fitri

harga tepung terigu naik cukup tinggi. 7. Kurangnya pasokan dan belum tibanya musim giling tebu menyebabkan harga gula sudah mulai naik sejak bulan Februari 2022.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

3. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan terkendalinya inflasi di Kota Tebing Tinggi, ada beberapa kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi diantaranya : 1. Melaksanakan Rapat Koordinasi TPID yang dilakukan setiap bulan dengan menghadirkan seluruh Tim TPID dan narasumber yang berasal dari BI, Biro Perekonomian Sekdaprovsu, BPS, Bulog, Polres, Danramil, dan Kadin Kota Tebing Tinggi sebagai salah satu upaya pengendalian harga (inflasi) dan ketersediaan pasokan di Kota Tebing Tinggi. 2. Melaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka menyambut bulan Suci Ramadhan dan HBKN Idul Fitri 1443 H demi menjaga ketersediaan pasokan, kestabilan harga serta kelancaran distribusi menjelang HBKN Idul Fitri 1443 H. 3. Melaksanakan survey harga bahan kebutuhan pokok setiap hari di tiga pasar yang berbeda. 4. Melakukan pengecekan stok ketersediaan bahan pangan kebutuhan pokok setiap sebulan sekali di kilang padi, grosir dan distributor, supermarket dan pasar serta melaporkannya. 5. Walikota Tebing Tinggi mengeluarkan surat terkait langkah-langkah dalam pengendalian inflasi dan pengamanan ketersediaan bahan kebutuhan pokok kepada SKPD terkait sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi yang dilaksanakan setiap bulan. 6. Walikota Tebing Tinggi Membuat surat edaran tentang Operasi Pasar minyak goreng. 7. Walikota Tebing Tinggi Membuat surat edaran tentang Operasi Pasar (Pasar Pengendalian Harga) menyambut Bulan Suci Ramadhan dan HBKN Idul Fitri 1443 H. 8. Melaksanakan Operasi Pasar Minyak Goreng demi menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga. 9. Melaksanakan Operasi Pasar (Pasar Pengendalian Harga) menjelang bulan Suci Ramadhan. 10. Melaksanakan sidak pasar guna mengantisipasi ketersediaan pasokan minyak goreng baik di distributor maupun di pasar pada tanggal 24 Februari dan 17 Maret serta 5 April, setelah ditetapkannya HET minyak goreng oleh pemerintah. 11. Melaksanakan sidak pasar dalam rangka menjaga kestabilan harga dan menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok menjelang Bulan Suci Ramadhan pada tanggal 30 Maret bersama dengan Tim Satgas Pangan Kota Tebing Tinggi serta SKPD terkait. 12. Tetap menjalankan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Tebing Tinggi, Pasal 31,32 dan 33 perihal izin dispensasi memasuki inti kota bagi kendaraan pengangkut bahan kebutuhan pokok dan barang penting lainnya sebagai salah satu upaya memperlancar distribusi dan kestabilan harga bahan pokok dan bahan khusus lainnya. Sampai dengan akhir bulan September kendaraan yang mendapatkan izin memasuki inti kota adalah sebanyak 84 kendaraan. 13. Memasang Baliho himbauan kepada masyarakat tentang Operasi Pasar Minyak Goreng yang diadakan Pemerintah Kota Tebing Tinggi 14. Memasang Baliho Himbauan kepada masyarakat dan para pedagang menjelang Bulan Suci Ramadhan dan HBKN Idul Fitri 1443 H. Baliho dipasang di 5 lokasi strategis di Kota Tebing Tinggi. 15. Melaksanakan Talkshow di Radio Lokal tentang “ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan pokok serta pemberlakuan peraturan PPKM dalam menyambut Bulan Suci Ramadhan 1443 H. 16. Tetap melaporkan dan mengupload perkembangan harga bahan kebutuhan pokok di pasar se-kota Tebing Tinggi setiap harinya di website <https://hargapangan.sumutprov.go.id> Dan mengumumkannya di radio lokal (Dis FM Tebing Tinggi) secara berkala. 17. Melanjutkan dan mengembangkan program Gempita serta optimalisasi Aplikasi Gempita melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Aplikasi Gempita sebagai salah satu market place lokal yang mencakup satu aplikasi untuk semua produk termasuk produk organik lokal, hasil pertanian, hasil peternakan dan UMKM dapat di download melalui playstore.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

4. **EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH** Beberapa kebijakan dan kegiatan pengendalian inflasi yang telah dilakukan oleh TPID Kota Tebing Tinggi secara umum berdampak dalam menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok yang secara otomatis dapat menekan laju inflasi di Kota Tebing Tinggi walaupun Kota Tebing Tinggi kota Non IHK, seperti :

1. Rapat koordinasi yang dilakukan oleh TPID Kota Tebing Tinggi setiap bulannya sudah cukup baik namun jika memungkinkan agar dapat selalu dihadiri oleh kepala SKPD agar hasil keputusan rapat dapat langsung ditindaklanjuti oleh SKPD terkait.
2. Sidak Pasar yang dilakukan merupakan salah satu cara Pemerintah Daerah untuk mengendalikan harga tetap stabil karena jika terjadi kenaikan yang signifikan Pemerintah Daerah dapat mengambil kebijakan contohnya dengan mengadakan Operasi Pasar atau Pasar Murah. Jika memungkinkan Sidak Pasar tidak hanya dilakukan saat menjelang HBKN atau momen momen tertentu saja karena secara tidak langsung bisa memberikan shock terapi kepada para pedagang untuk tidak berlaku curang dan tidak melakukan penimbunan barang sepihak demi mendapatkan keuntungan.
3. Pemberian izin dispensasi memasuki inti kota bagi kendaraan pengangkut bahan kebutuhan pokok dan barang penting lainnya sangat dirasakan sekali dampaknya baik bagi pedagang maupun masyarakat karena di satu sisi bisa mengurangi biaya bongkar muat ataupun biaya sewa gudang yang dibebankan ke harga jual seperti di daerah lain. Dengan adanya izin ini kendaraan dapat langsung masuk ke pusat kota dan menurunkan barangnya langsung di lokasi penjualan.
4. Update data harga bahan kebutuhan pokok yang dilakukan setiap hari melalui website <https://hargapangan.sumutprov.go.id> dapat membantu pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak jika sewaktu-waktu terjadi kenaikan bahan kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya.
5. Inovasi Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam membuat aplikasi Gempita dan Mutrans dapat mendukung perluasan akses pasar produk pertanian, peternakan, dan UMKM di Kota Tebing Tinggi. Perluasan digitalisasi khususnya di Kota Jasa seperti Tebing Tinggi menjadi pilihan yang tepat untuk mendorong aktivitas perekonomian daerah khususnya di masa pandemi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

5. **REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH** Langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang mendukung pengendalian inflasi daerah khususnya yang terkait keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif yaitu :

1. Meningkatkan awareness dari seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah termasuk Kapolres, Danramil, KADIN dan Bulog serta Tim Satgas Pangan dalam menjalankan program kerja yang berkaitan dengan pengendalian harga, ketersediaan pasokan dan pengendalian inflasi
2. Meningkatkan kerjasama antar daerah terutama daerah yang memiliki surplus bahan kebutuhan pokok khususnya yang mempengaruhi tingkat inflasi.
3. Mendorong pemerintah provinsi untuk menerbitkan payung hukum dana subsidi pasar murah/operasi pasar.
4. Percepat Koordinasi dengan pihak yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk mensuplay minyak goreng di Kota Tebing Tinggi seperti PPI dan RNI demi ketersediaan pasokan minyak goreng curah di Tebing Tinggi.
5. Mendorong terbentuknya rumah BUMN-rumah BUMN lain yang dapat mendukung pelaku UMKM di Kota Tebing Tinggi.
6. Untuk mengamankan ketersediaan dan pasokan perlu diadakan Controlled Atmosphere Storage (CAS) melalui CSR dari BUMN atau Perusahaan di sekitar Kota Tebing Tinggi.
7. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta, seperti perbankan, BI dan Pertamina dalam hal peningkatan kualitas UMKM melalui pelatihan dan pendampingan (khusus pelatihan digitalisasi untuk wirausaha muda yang memang sangat diperlukan di masa pandemi saat ini).
8. Mendorong UMKM Kota Tebing Tinggi agar bisa masuk ke pasar retail

dan pasar ekspor. 9. Sosialisasi atas inovasi aplikasi Gempita dan Mutrans perlu terus digencarkan sehingga semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan menggunakan aplikasi dimaksud dan dapat memperpendek rantai pasokan.